



MENGGUGAT PEMBANGUNAN PERKOTAAN: BELAJAR DARI MASYARAKAT AGRARIS

Budi Puspo Priyadi

ABSTRACT

Urbanization as a process change of countryside society become urban community seems fast progressively happened in Indonesia, specially in Java. Change of physical aspect to culture and social aspects generate various problems for example the fading of reconciliation values or society harmony in urban area. Arrange social and culture values which during the time is on rural society experience of eroding process.. Modernization or more special industrialize and capitalism is process movement of civilization of society accused as his cause.

Keywords: urbanization, industrialization, inharmonious

A. PENDAHULUAN

Ayem tentrem ing desane, Pak tani
Urip rukun bebarengan
Mbangun desa sak kancane, Pak tani
Nyambut gawe tanpa pamrih
Wayah esuk wis podho nggiring sapine
Rame-rame nggarap sawah lan kebone
Pancen luhur bebudenne Pak tani
Keno kanggo patuladan
Nyambung urip sak kancane Pak tani
Jujur tindak lan lakune (Cuplikan lagu "Pak Tani", Koes Plus)

Barangkali lagu yang dulu dinyanyikan oleh group band Koes Plus pada era tahun 70-an sudah tidak lagi akrab di telinga kita seiring dengan berlalunya waktu dan pudarnya kehidupan masyarakat agraris yang identik dengan suasana *ayem tentrem* meskipun cara pandang melihat kondisi desa semacam itu sering disebut sebagai *Pastorial View*, yakni melihat desa serba tenang dan damai. Dalam kenyataannya gejala modernisasi dan urbanisasi sekarang memasuki desa-desa juga (Boelaars, 1984: 72). Urbanisasi pertama-tama merujuk pada keadaan persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dalam suatu negara; kedua, ia merujuk pada suatu

Alamat Korespondensi :
Email : budipuspo@yahoo.com
Hp : 081325735999

proses, yaitu peningkatan jumlah penduduk kota (Evers, 1982: 49).

Gejala meningkatnya urbanisasi diperkotaan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang semakin besar. Hal itu dapat dilihat proporsi penduduk yang tinggal di daerah perdesaan semakin berkurang, baik disebabkan oleh migrasi penduduk maupun perluasan wilayah perkotaan. Menurut Tjiptoherijanto dalam Chotib (1997:50) migrasi perdesaan ke perkotaan memberi kontribusi sebesar 40 persen, pertumbuhan alamiah daerah perkotaan 50 persen dan reklasifikasi wilayah sebesar 10 persen. Ada kecenderungan beberapa kota besar akan selalu terus tumbuh dan berkembang, kemudian membentuk kota yang disebut kota-kota metropolitan. Pada tahun 1950 hanya ada satu kota dengan penduduk 1 juta jiwa yaitu Jakarta. Pada tahun 1980 meningkat menjadi 4 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan. Pada tahun 1990 meningkat menjadi 8 dengan tambahan Semarang, Yogyakarta, Palembang dan Ujung Pandang (Tjiptoherijanto, 1999). Untuk kota Semarang sendiri jumlah penduduk pada tahun 2002 tercatat 1.455.994 (BPS, 2003: 55).

Selain masalah proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, Indonesia sejak lama hingga kini mengalami persebaran penduduk yang tidak merata di mana lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang

luasnya kurang dari 7 persen luas daratan Indonesia. Hal ini tidak mengalami perubahan yang berarti selama tiga puluh lima tahun terakhir. Persentase penduduk yang tinggal di Pulau Jawa mengalami penurunan dari 65 persen pada tahun 1961 menjadi 59,07 persen pada tahun 1995 (BPS, 1995: 153-154). Keberhasilan program KB dengan penurunan persentase pertumbuhan penduduk pada tahun 1980-1990 sebesar 1,97 persen, tahun 1990-2000 sebesar 1,49 persen dan tahun 2000-2004 sebesar 1,43 persen ikut mengerem laju pertumbuhan alami di Indonesia (BPS, 2005: 64).

Selain itu, terjadi pula pergeseran *mode of production* yang dulunya lebih banyak di sektor pertanian, sekarang ini telah bergeser ke sektor perdagangan dan industri serta jasa (Davis, 1967: 9; Friedmann & Robert, 1975: 4; Nas, 1979: 42). Dari tahun 1971, 1980 sampai tahun 1990 telah terjadi penurunan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, yakni dari 64,2% menjadi 55,9% dan 49,3%. Pada tahun 2000-an angka itu tentu saja terus berkurang seiring dengan semakin pesatnya pembangunan di daerah perkotaan dan juga sebagai akibat Revolusi Hijau, yakni masuknya teknologi pertanian di perdesaan (Nasikun, 1980: 15). Revolusi Hijau mulai diterapkan di Indonesia pada masa Repelita II, mulai tahun 1974/1975. Kebijakan itu berasal dari laporan Pearson, yang mengusulkan dilakukannya cara

tersebut di negara-negara agraris miskin, berdasarkan pandangan yang ingin mengatasi masalah kemiskinan negara berkembang dari bawah dengan tidak memandang penting tingkat pertumbuhan yang tinggi. Strategi itu merupakan cara yang berbeda dengan strategi pertumbuhan dengan mitosnya *trickle-down process*, meskipun keduanya dipakai oleh Indonesia (Rahardjo, 1983: 127-128).

Menurut analisa Breman (1980: 3), untuk negara-negara Dunia Ketiga, termasuk juga Indonesia ternyata tidak semuanya terserap di sektor industri atau sektor modern, hanya separoh bahkan kurang, akibatnya banyak dari kaum urban yang terlibat dalam kegiatan sektor informal. Fenomena sektor informal di Indonesia dan juga negara-negara Dunia Ketiga setidaknya mampu menampung arus tenaga kerja yang datang ke kota (Sethuraman, 1985: 94) meskipun hal itu juga menimbulkan persoalan yang pelik dalam hal penataan dan pener-tibannya. Misalnya kasus-kasus penataan Pedagang Kaki Lima di berbagai kota selalu berakhir dengan keributan karena entitas Pedagang Kaki Lima (singkatan Kanan Kiri Lintas Manusia) yang selalu menempati wilayah yang ramai dikunjungi orang pada akhirnya mengganggu ketertiban umum.

B. PEMBAHASAN

Persoalan urbanisasi di Indonesia akhirnya semakin

kompleks karena terjadi gejala "urbanisasi berlebih" (*over-urbanisasi*) "urbanisasi semu" (*pseudo-urbanization*) atau (*hyper urbanization*) di mana tingkat urbanisasi yang terjadi terlalu tinggi di atas tingkat industrialisasi yang dicapai oleh evolusi suatu masyarakat (Nasikun, 1980; 1996: xiii-xiv). Namun menurut Evers (1980) hal tersebut bukanlah "urbanisasi berlebih" melainkan "keterbelakangan perkotaan" (*urban under development*) karena di kota terjadi pembagian pendapatan dan kekayaan yang semakin tidak merata. Proses industrialisasi ini kerap kali praktis merupakan inti dari "*economic development*" bahkan pembangunan atau perkembangan ekonomi sering diidentikan dengan industrialisasi (Rahardjo, 1983: 225), sedangkan urbanisasi adalah salah satu bagian dari proses industrialisasi yang tak dapat dihindarkan (Todaro & Jerry, 1985: 8). Industrialisasi adalah mengenai perubahan riil yang dapat diamati secara obyektif dan diukur secara statistik, khususnya mengenai pergeseran dari pertanian ke industri dan dari perdesaan ke kota. Industrialisasi fokusnya bersifat teknologis, meskipun dalam perkembangannya bersifat ekonomis (Goldthorpe, 1992: 210).

Masalah urbanisasi di Indonesia sebenarnya telah dikaji oleh banyak ahli mulai tahun 1980-an di mana pada era itu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia

amat pesat sebagai akibat Bonanza Minyak atau *Oil Boom* (Arndt, 1983: 96-113). *Oil Boom* di Indonesia ternyata juga menimbulkan dampak terjadinya kontradiksi kultural seperti pernah melanda kapitalisme Barat dan dicermati oleh Daniel Bell (1978) dalam bukunya “*The Cultural Contradictions of Capitalism*” (Kuntowijoyo, 1987: 11; lihat juga Bertens, 1983: 202; Budiman, 1997: 14). Sebelum Bell, David Riesman dkk, sudah mencermati dampak kapitalisme di Barat dalam bukunya “*The Lonely Crowd: A Study of Changing American Character*” (1953); juga Philip Slater “*The Pursuit of Loneliness: American Culture at the Breaking Point*” (1971) (dalam Kuntowijoyo, idem, 83). Dari tinjauan aspek psikologi, Fromm (terjemahan, 1995) juga melihat dampak kapitalisme yang menimbulkan masyarakat tidak sehat, karena selalu minta lebih banyak lagi (*acquisitive society*). Penulis lain yang relatif baru juga mengkritik laju pesatnya modernisasi dalam masyarakat industri sebagai masyarakat yang beresiko akan hal-hal yang buruk dan berbahaya (Beck, 1992).

Sementara itu, berbagai kritik atas strategi pembangunan Indonesia juga gencar ditulis, salah satunya adalah tulisan Arief dan Adi Sasono (1981) tentang thesis ketergantungan Indonesia terhadap modal asing yang ternyata sangat merugikan tetapi sangat menguntungkan pemilik modal asing. Buku

itu sempat dilarang beredar di era 80-an karena membongkar praktek-praktek kapitalis birokrat sehingga memunculkan istilah kaum *komprador*, seperti terjadi di negara Amerika Latin. Di Indonesia mungkin sama dengan istilah *Demang ngiras Tangkulan* (bahasa Jawa). Persekongkolan kapitalisme dengan urbanisasi sepertinya susah hindari, (Dear & Allen, 1981), bahkan untuk melawan paham kapitalisme juga susah karena ketika paham itu semakin dikritik dan dilawan dia semakin canggih menampakkan dirinya (Budiman, 1997).

Akibat dari hal itu semua irama kehidupan masyarakat, terutama di daerah perkotaan secara otomatis mengikuti irama kehidupan *non-agriculture* yang lebih ketat sebagai akibat *mode of production* yang memang memaksa orang untuk hidup mengikuti pola industri. Menurut Thompson (1963), dalam arena industri memang dituntut untuk disiplin dengan waktu, sehingga ada perbedaan mengenai jam kerja dengan jam istirahat, hari kerja dengan hari libur (dalam Lii, 1998: 123). Greenhaus dan Beutell (1985) secara khusus menyoroti konflik antara keluarga dan pekerjaan. Salah satu faktor yang bisa menimbulkan konflik adalah masalah waktu karena irama di dunia kerja yang ketat akan mengganggu kehidupan keluarga (dalam Burke, 1988: 288). Ada mitos yang populer bahwa industrialisasi telah menghancurkan harmoni keluarga dan

kehidupan komunitas (Hareven, 1994: 14). Seorang pengamat yang mencermati tentang keluarga di era modern yaitu David Popenoe (1988) menulis buku "*Disturbing the Nest: Family Change and Decline in Modern Societies*" (dalam Gelles, 1995: 500). Dari judul buku tersebut tersirat bagaimana modernisasi telah mengusik keluarga dengan diibaratkan sebuah sarang yang terganggu. Padahal keluarga mempunyai peran yang besar dalam proses enkulturasi, pengasuhan dan juga sosialisasi (Geertz, 1985: 3-7; Magnis-Suseno, 1984: 168-176; Muncie *et al*, 1995: 23). Berdasarkan studi Halberstam (1993 dalam Gelles, 1995: 486), masyarakat Amerika di mana tingkat industrialisasi sudah demikian tinggi, mulai ada kecenderungan untuk mengidealkan kehidupan keluarga seperti masa tahun 1950-an, yang begitu harmonis.

Perjalanan dari kondisi perdesaan ke perkotaan ditandai oleh meningkatnya kepadatan jalinan peran (Southall dalam Banton, 1973: 47). Orang akhirnya terjebak menjadi bagian dari sebuah mesin produksi, sehingga Marx menyalahkan kapitalisme yang mendorong terjadinya *alienasi* atau keterasingan manusia dalam dunia kerja yakni : rutinitas kerja, rasa tidak memiliki produk, saling berkompetisi, dan perasaan *homeless* di tempat kerja (Macionis, 1991: 104-105). Akibatnya hidup kerja menjadi teramat penting bagi kebanyakan orang dalam masyarakat jaman sekarang (Berger, *et al*,

1992 : 102). Sebagai suatu proses perubahan peradaban, tampaknya hal tersebut memang tidak bisa terelakkan dan dihindari (*inevitable*).

Untuk memahami kehidupan kota, Nas melihat faktor manusialah yang paling pokok karena kota dapat dipandang sebagai suatu sistem nilai-nilai, perasaan, kenang-kenangan dan hubungan-hubungan dan keseluruhannya bersama-sama membentuk suatu sistem atau organisasi (1979: 28), meskipun manusia modern menurut pengamatan sejarahwan Black mengalami disorganisasi sosial karena ikatan kedekatan individu menghilang (1966: 31-32; Soedjito, 1986:62). Di kota lingkungan tidak dipandang sebagai tempat untuk bermasyarakat, tetapi sebagai tempat bekerja semata-mata (Slater dalam Kuntowijoyo, 1987: 105). Lain sifat yang seringkali diberikan oleh orang kota kepada masyarakat desa adalah sifat ketentraman seperti apa yang dikatakan oleh Boeke "Desa itu bukan tempat bekerja, tetapi tempat ketentraman dan ketentraman itu adalah hakikatnya hidup yang sebenarnya bagi orang timur" (dalam Koentjaraningrat, 1967).

Carut marut kehidupan di kota setidaknya perlu direnungkan kembali bagaimana cara mengantisipasi agar proses dehumanisasi tidak terus terjadi. Filosof Marcuse pernah melontarkan suatu gagasan berupa resignasi, yaitu penarikan diri pada kesadaran yang menolak dicaplok oleh sistem kapitalisme

(Magnis-Suseno dalam Sindhunata, 1982 : xx; Sastrapratedja, ed, 1983: 140). Gagasan Marcuse tersebut terkenal dengan istilah *The great refusal*. Sebagai anggota Sekolah Frankfurt bersama Horkheimer, termasuk juga Erich Fromm, dia ingin mengembangkan kesadaran yang kritis terhadap perjalanan masyarakat industri sebagai dilema usaha manusia rasional (Sindhunata, 1982). Marcuse melihat bahwa masyarakat industri tak ubahnya sebagai masyarakat yang berdimensi satu (*One Dimension Man*), segala segi kehidupannya diarahkan pada satu tujuan saja, yakni keberlangsungan dan peningkatan sistem yang telah ada, yakni kapitalisme (Sudarminta, 1983: 121-174).

Permasalahan yang muncul adalah apakah kita mampu terbebaskan dari belenggu tersebut?. Menurut pemikiran Peacock dan Thomas, dalam dunia modern ada disharmoni yang tidak terelakkan antara budaya (*the logico-meaningful*) dengan sistem (*the causal-functional*), meskipun kemudian menurut Zijderveld dalam masyarakat yang serba abstrak, orang merindukan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang asal (dalam Kuntowijoyo, 1987: 95). Bell mengatakan bahwa kapitalisme telah menimbulkan kontradiksi budaya karena adanya keterpisahan antara jenis organisasi dan norma-norma yang dituntut di wilayah ekonomi di satu pihak dengan norma-norma realisasi diri; prinsip-prinsip ekonomi

dan budaya sekarang membawa orang ke arah yang berlawanan, di mana hal itu dulu tidak terjadi (dalam Sindhunata, 1982: 8; dalam Budiman, 1997: 125). Marcel Mauss, kemenakan dan murid terpadai E. Durkheim melihat bahwa berbagai masalah sosial dan krisis ekonomi dalam masyarakat modern dewasa ini disebabkan oleh corak ekonomi modern yang terspesialisasi fungsi-fungsinya, terutama dalam kontrak-kontrak yang berlaku dalam tukar-menukar di antara uang, barang, dan jasa. Kontrak-kontrak tersebut tidak bermuatan unsur-unsur pribadi atau perorangan tetapi individualistik dan utiliti (kegunaan) saja (Suparlan, 1992: xxiv).

Belajar Dari Masyarakat Agraris

Kerinduan orang akan harmoni, terutama pada masyarakat perkotaan membuat kita perlu menoleh ke belakang, di mana dulu kita lebih banyak berpijak di lingkungan perdesaan. Masyarakat perdesaan yang digambarkan oleh banyak ahli sebagai masyarakat dengan ciri hubungan sosial yang erat, rukun, harmonis (model *Gemeinschaft*), setidaknya menjadi rujukan tentang idealisasi bentuk kehidupan meskipun kondisi kehidupan di daerah perdesaan sendiri juga tidak steril terhadap perubahan. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya perlu dipetik dari orang desa?

Antropolog G. M. Foster mengamati masyarakat agraris

memiliki sebuah gagasan perihal keterbatasan sumber daya (*the Image of Limited Good*) yakni sebagai berikut: “segala sesuatu yang ada dalam lingkungan kehidupan dalam keadaan terbatas jumlahnya; baik yang berkaitan dengan sumber daya alam, kekuasaan, kesempatan maupun sesuatu yang hadir dalam bentuk simbolik seperti status sosial”. Oleh karena itu mereka yang berhasil mendapatkan sumber daya yang terbatas itu secara berlebihan telah mengambil hak orang lain secara berlebihan pula sehingga harus segera mengembalikan dan mere-distribusikan kepada masyarakat karena hal itu memang milik bersama yang harus dikembalikan (1967:304-305).

Apa yang dikemukakan oleh Foster tersebut memberikan suatu pemahaman perihal perlunya pertukaran sosial berupa hubungan yang bersifat resiprokal, baik yang dilakukan secara simetris maupun asimetris dan redistribusi yang berlangsung dalam komponen masyarakat yang berbeda. Hal itu pada hakekatnya berfungsi sebagai media sosial dalam mewujudkan integrasi dan harmoni dalam masyarakat. Pertukaran sosial itu dapat berwujud pertukaran benda atau pertukaran yang bersifat simbolik, sesuai dengan bingkai yang telah ditentukan oleh kebudayaan suatu komunitas (dalam Sairin, 2002: 67). Berbagai adat upacara tradisionil yang ada di desa seperti

Sedekah Bumi, Merti Desa adalah salah satu bentuk bagaimana orang desa mencoba mengingat dan menghormati keberadaan alam semesta sehingga keselarasan dengan manusia selalu terjaga. Meskipun intensitas upacara-upacara seperti itu sudah berkurang tetapi di desa-desa yang masih kental adat istiadatnya masih diselenggarakan. Kearifan tradisional semacam itu mampu menjaga kelestarian alam sehingga kerusakan alam bisa dihindari. Khusus untuk menghormati Dewi Sri sebagai lambang kesuburan, orang desa di Jawa misalnya sengaja membangun rumah dengan membuat tiga bagian kamar, yakni *sentong tengen* (bilik kanan), *tengah* (bilik tengah) dan *kiwo* (bilik kiri). *Sentong tengah* adalah tempat yang dikeramatkan karena untuk tempat upacara pemberian sesaji bagi Dewi Sri. *Slametan* seperti yang lazim dilakukan oleh orang Jawa melambangkan kesatuan mistis dan sosial mereka yang ikut serta di dalamnya (Geertz, 1981: 13), bahkan ada slametan untuk memelihara rasa solidaritas sosial dan untuk menciptakan suatu suasana damai, bebas dari rasa permusuhan dan prasangka terhadap orang lain (Koentjaraningrat, 1984: 347).

Dalam konteks masyarakat perkotaan di mana diferensiasi semakin meluas sehingga menimbulkan masalah baru untuk integrasi (Goldthorpe, 1992: 15) tentu saja berbagai bentuk pertukaran sosial

semakin perlu dilakukan. Permasalahan yang timbul adalah tidak semua komponen masyarakat mempunyai aset, baik berupa modal ekonomi maupun kemampuan (*skill*) yang bisa dipertukarkan, artinya adalah terjadi ketimpangan kepemilikan aset pada masing-masing komponen. Akibatnya tentu saja akan terjadi persoalan ketidaksetaraan pertukaran di mana malapetaka itu semua bermula. Mereka-mereka yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa dipertukarkan dalam kehidupan di perkotaan, akhirnya harus terlempar dari lingkaran 'asosiasi orang kota' sehingga menjadi semakin teralienasi. Meskipun pola kehidupan di kota cenderung impersonal tetapi dalam kenyataannya banyak ikatan-ikatan baru bermunculan di kota sebagai bentuk kerinduan orang akan intimitas satu sama lain. Biasanya ikatan seperti itu bisa bermula dari ikatan satu daerah, kekerabatan (*trah*), religiusitas, profesi, hobby, bisnis dan sebagainya.

Melihat bahwa intensitas persoalan kemanusiaan di perkotaan semakin mendalam perlu ada tata kelola berbagai sektor penghidupan di perkotaan yang baik. Dalam hal ini perlu ada kesadaran para pemangku kepentingan (*stake holder*) untuk mengelola kota secara manusiawi, meskipun secara riil dihadapi oleh berbagai masalah yang sudah di luar kapasitas kemampuan daya dukung kota itu sendiri. Kekerasan terhadap

anak di Indonesia menurut laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak cenderung meningkat. Pada tahun 2004 terjadi 441 kasus dan tahun 2005 ada 736 kasus. Menurut pengamatan Psikolog Sarlito Wirawan dan juga pemerhati anak Seto Mulyadi hal itu terjadi karena tekanan hidup semakin kompleks, kemiskinan, pengangguran dan PHK yang terjadi pada orang tua ("Ketika Rumah Tidak Aman Lagi bagi Anak", *KOMPAS* Jum'at 13 Januari 2006; "Kekerasan Pada Anak Runtuhnya Makna dan Nilai Luhur Keluarga", *KOMPAS*, Kamis 26 Januari 2006).

Kembali pada teori Foster, masing-masing pihak yang bermukim di kawasan perkotaan harus melakukan pertukaran agar terjadi harmoni. Misalnya, pihak penguasa kota yang sudah mendapatkan mandat dari pemilihnya, harus mengembalikan kepada khalayak suatu kebijakan tata kelola perkotaan yang menguntungkan semua pihak. Keterbatasan lahan memang menjadi problem utama di perkotaan sehingga ruang publik yang seharusnya bisa menjadi media rekreasi masyarakat akhirnya semakin berkurang. Kasus di kota Semarang, lahan sebelah timur Simpang Lima yang pada tahun 1970-an adalah sebuah taman yang penuh dengan pohon rindang sekarang sudah berubah menjadi pusat pertokoan. Meskipun bisa juga sebagai ruang publik tetapi sarat dengan budaya konsumerisme yang

ujung muaranya adalah kapitalisme. Demikian pula rencana renovasi Pasar Yaik masih belum tuntas karena ada kekhawatiran para pemerhati kota untuk tetap mempertahankannya sebagai ruang publik.

Perubahan *mode of production* di kotapun sebenarnya sudah disadari oleh berbagai pengamat yang mengkaji dinamika pekerja kaum urban. Kesadaran bahwa bekerja di kota itu sarat dengan berbagai problematik memunculkan bentuk-bentuk *treatment* yang bertujuan membuat kantor atau tempat kerja serasa *feel at home, feel as family*. Perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor banyak yang sering melakukan acara *Family Gathering*, suatu acara yang bertujuan untuk menyatukan semua komponen tidak hanya semata-mata sebagai alat produksi tetapi sebuah keluarga yang mempunyai visi, misi, tujuan dan nasib yang sama. Acara semacam itu biasanya diselingi oleh atraksi hiburan, pemberian hadiah, pesta yang kesemuanya itu adalah merupakan bentuk redistribusi sehingga tercipta harmonisasi. Dalam perspektif Durkheimian hal itu berdimensi moralistik atau sebagai nilai yang dapat berfungsi sebagai pedoman bertingkah-laku guna membantu individu-individu berintegrasi dalam kebersamaan, baik yang bersifat kemasyarakatan atau organisasi (Larsen, 1994: 3). Terbukti pada kasus orang Jepang, mereka mempunyai kesetiaan yang kuat

dengan tempat kerjanya karena memandang bahwa tempat kerja adalah perluasan dari keluarga (Morgan, 1986: 114).

Dilingkup tempat tinggalpun, mau tidak mau orang tidak bisa hidup sendiri. Justru di kota di mana kondisi sosiologisnya berbeda dengan di desa, orang pada akhirnya menemukan *sedulur* baru, yaitu tetangga kanan kirinya. Orang mau tidak mau harus berubah dan menyesuaikan diri dengan keadaan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri ala Robinson Crusoe. Mengikuti cara berpikir Parsonian bahwa manusia bisa melakukan penyesuaian adaptif (Goldthorpe, 1992: 16), dalam kondisi tertentu pada akhirnya menciptakan bentuk-bentuk hubungan sosial baru yang bertujuan untuk memenuhi hasratnya sebagai makhluk sosial. Misalnya arisan di lingkungan tempat tinggal atau di tempat kerja, kerja bakti dan ronda malam di lingkungan, hal itu sebagai pentunjuk adanya bentuk wahana integrasi di perkotaan. Mereka yang tidak terlihat aktif dalam kegiatan seperti itu biasanya dikatakan *ora lumrah* atau eksklusif. Dikompleks perumahan elit diperkotaan kegiatan ronda malam atau kerja bakti biasanya tidak dilakukan oleh warga tetapi dikerjakan oleh tenaga profesional. Hal ini mengisyaratkan bahwa kesibukan dan profesionalisme sudah menjadi hal yang umum di perkotaan.

C. PENUTUP

Dari ulasan singkat di atas yang sebetulnya sudah direnungkan oleh banyak orang sehingga tidak lebih seperti 'bunga rampai', pada akhirnya dapat digaris bawahi bahwa gerak laju perubahan menjadi 'orang kota' adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Dari aspek kependudukan, menurut Todaro (1985: 11) untuk mengerem laju migrasi yang mendorong cepatnya urbanisasi perlu dilakukan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terfokus di kota (*urban bias*). Selain itu, dengan masih terkonsentrasinya penduduk Indonesia di Pulau Jawa sebagai masalah klasik perlu dilakukan percepatan pembangunan di luar kawasan Pulau Jawa.

Sebagai makhluk yang adaptif, kita dituntut untuk bisa selalu menyesuaikan diri dalam kondisi lingkungan yang selalu berubah. Perubahan yang kita lakukanpun harus tetap pada tata nilai kemanusiaan yang hal itu menjadi perekat kita semua sebagai makhluk sosial. Sebagai renungan, apakah kita berhak untuk menggugat kebijakan yang ada, sementara kita dalam kondisi terseret arus besar baik secara teori maupun politik pembangunan kebijakan yang *notabene* bercirikan kapitalistik?

DAFTAR PUSTAKA

- Arndt, H. W., (ed). 1983. *Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde Baru*. Jakarta : LP3ES.
- Beck, Ulrich. 1992. *Risk Society Toward a New Modernity*. London : Sage Publications.
- Boelaars, Y. 1984. *Kepribadian Indonesia Modern suatu Penelitian Antropologi Budaya*. Jakarta : Gramedia.
- Budiman, Hikmat. 1997. *Pembunuhan Yang Selalu Gagal, Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Burke, R. J. 1988. "Some Antecedents and Consequences of Work-Family Conflict", dalam E. Goldsmith, *Work & Family Theory, Research and Applications*. Corte Madera : Select Press.
- Davis, Kingsley. 1967. *The Urbanization of The Human Population Introducing a study of cities and the worldwide trend toward urbanization*, dalam Flanagan, Dennis (ed), *Cities*. Alfred A. Knopf.

- Dear, Michael. & Allen J. Scott (ed). 1981. *Urbanization and Urban Planning in Capitalist Society*. New York : Methuen, Inc.
- Evers, Hans-Dieter. 1982. *Sosiologi Perkotaan Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : LP3ES.
- Foster, G. M. 1967. "Peasant Society and The Image of Limited Good", dalam *Peasant Society A Reader*, Jack M. Potter *et all* (ed). Boston : Little, Brown & Company.
- Fromm, E. 1995. *Masyarakat yang Sehat*, (Terjemahan). Jakarta : Yayasan Obor.
- Gelles, R. J. 1995. *Contemporary Families A Sociological View*. London : Sage.
- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Geertz, Hildred. 1985. *Keluarga Jawa* (Terjemahan). Jakarta : Grafiti Press.
- Goldthorpe, J, E. 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga Kesenjangan dan Pembangunan*, Edisi Kedua. Jakarta : Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*, PN. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. 1987. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Morgan, Gareth. 1986. *Images of Organization*. California : Sage Publications.
- Rahardjo, Dawam. 1983. *Esai-esai Ekonomi Politik*. Jakarta : LP3ES.
- Sindhunata. 1982. *Dilema Usaha Manusia Rasional Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt*. Jakarta : Gramedia.
- Sudarminta, J. 1983. "Kritik Marcuse terhadap Masyarakat Industri Modern" dalam Sastrapratedja, M., (ed.), *Manusia Multi Dimensional sebuah renungan filsafati*, Cetakan kedua. Jakarta : Gramedia.
- Suparlan, Parsudi. 1992. "Kata Pengantar" dalam Marcel Mauss, *Pemberian, Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno* (Terjemahan). Jakarta : Yayasan Obor.
- Todaro, Michael, P. & Jerry Stilkind. 1985. "Dilema Urbanisasi" dalam *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di kota*, Chris Manning & Tadjuddin Noer Effendi (Penyunting). Jakarta : Gramedia.

- Chotib. 1997. "Rekayasa Urbanisasi di Perdesaan: Salah Satu Upaya Rekayasa Demografi" *Warta Demografi*, Edisi Khusus. Jakarta : Lembaga Demografi FE UI.
- Evers, Hans-Dieter, 1980. "Produksi Subsistensi dan "Massa Apung", dalam *PRISMA* VIII. No. 6. 35-43.
- Lii, D. T. 1998. "Social Spheres and Public Life A Structural Origin" dalam *Theory, Culture & Society*. Vol. 15 (2). 115-135.
- Nasikun. 1980. "Urbanisasi Berlebih, Involusi Perkotaan dan Radikalisme Politik di Negeri-negeri Berkembang", dalam *PRISMA* VIII, No. 6. 9-22.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1999. "Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia". *POPULASI*. Vol 10, No. 2. 57-72.
- BPS. 1995. *Statistik Dalam 50 Tahun Merdeka Data dan Ulasan*. Jakarta : Biro Pusat Statistik.
- BPS. 2001. *Ulasan Singkat Nasional Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 Seri L 2.1*. Jakarta : Biro Pusat Statistik.
- BPS. 2003. *Jawa Tengah Dalam Angka 2003*. Semarang : Biro Pusat Statistik Jawa Tengah dan Bappeda Jateng.
- BPS. 2005. *Statistik Indonesia*. Jakarta : Biro Pusat Statistik.